

KONFLIK DAN RELASI KEKUASAAN DI AJATAPPARENG 1905-1942 (CONFLICT AND POWER RELATIONS ON AJATAPPARENG 1905-1942)

Muhammad Amir, Masgaba, Syahrir Kila
Balai Peletarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
muhabpnb@yahoo.co.id

Abstract

The study was to reconstruct the background and conflict dynamics between the Dutch Indian government and local rulers in the Ajatappareng region. In addition, the study also described the post-conflict power relations in the region. Studies indicate that conflict between both sides is lattered by political and economic interests. This conflict began when the Dutch Indian government was about to rule directly over all the kingdoms of the Ajatappareng region (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, and Alitta). Direct domination was meant not only to further consolidate the position of colonial rule but also to master potential economic resources for the interest of the Dutch Indian government. This conflict ended with the signing of korte verklaring, a statement of complete surrender to the Dutch Indian government. The implication was that the seat of authority of the local rulers, especially the royal central nobility and all the kingdoms in the Ajatappareng became the jurisdiction of the Dutch Indian government. The study using historical methods that explain matters according to historical perspective, through heuristic, source criticism of interpretation, and historiography.

Keywords: *conflict, power relations, and Ajatappareng*

Abstrak

Kajian ini bertujuan merekonstruksi latar belakang dan dinamika konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan para penguasa lokal di wilayah Ajatappareng. Selain itu, kajian ini juga menguraikan tentang relasi kekuasaan pasca konflik di wilayah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik antara kedua belah pihak dilatari oleh kepentingan politik dan ekonomi. Konflik ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda hendak menguasai secara langsung seluruh kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta). Penguasaan secara langsung bukan hanya dimaksudkan untuk lebih mengokohkan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial, melainkan juga untuk menguasai sumber daya ekonomi yang potensial bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Konflik ini diakhiri dengan penandatanganan *korte verklaring* (pernyataan pendek), yaitu pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Implikasinya adalah hilangnya kedudukan kekuasaan para penguasa lokal, terutama bangsawan pusat kerajaan dan seluruh kerajaan-kerajaan di Ajatappareng menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah, melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Kata kunci: konflik, relasi kekuasaan, dan Ajatappareng

PENDAHULUAN

Pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906) kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909) pada April 1905 tersebut, menunjukkan bahwa upaya pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai secara langsung seluruh daerah Sulawesi Selatan, mendapat penolakan dari para penguasa lokal di daerah ini. Penolakan itu menjadi pemicu terjadinya konflik kekerasan berupa perang terbuka antara pemerintah Hindia Belanda dengan sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng.

Pemerintah Hindia Belanda semakin bergiat untuk memperluas wilayah dan kekuasaan kolonialnya di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Perluasan wilayah dan kekuasaan tersebut, bukan hanya bertujuan menguasai secara langsung seluruh daerah ini, melainkan juga untuk mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk melapangkan perluasan penanaman modal swasta Belanda di Sulawesi Selatan. Perluasan penanaman modal swasta Belanda itu, terutama ditujukan kepada daerah-daerah yang potensial bagi usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan (Harvey, 1989:45; Abduh, dkk. 1985: 93-96).

Dalam rangka perluasan wilayah dan kekuasaan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk memaksa dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Terutama yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya atau yang belum dikuasai secara langsung. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan penandatanganan *korte verklaring*¹ (pernyataan pendek) oleh para raja atau penguasa lokal di daerah ini, yaitu pernyataan tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda (Poelinggomang, 2004:2).

Ketika itu, terdapat sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan yang belum dikuasai secara langsung dan dianggap sebagai kerajaan sekutu atau pinjaman berdasarkan pembaharuan Kontrak Bungaya (1824). Di antaranya adalah Kerajaan Luwu, Gowa, Bone, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Konfederasi Ajattappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta), Konfederasi Massenrempulu (Enrekang, Maiwa, Malua, Alla, Buntubatu, Kassa, dan Batulappa), dan Konfederasi Mandar (Balanipa, Sendana, Majene, Pambauang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang).² Oleh karena sebagian kerajaan itu menolak pernyataan pendek, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah Hindia Belanda melancarkan ekspedisi militer di Sulawesi Selatan pada 1905-1906. Tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*). Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun di balik kebijakan itu, bahwa yang terpenting adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Sebab secara *de jure* wilayah Hindia Belanda berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat (Poelinggomang, 2005:14). Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan pengiriman ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu atau sahabat, termasuk kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng.

Uraian singkat tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, terutama di wilayah Ajatappareng tampaknya tidak luput dari konflik

kekerasan. Karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan latar belakang, serta dinamika dan penyelesaian konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng. Sebab, dinamika kesejarahan di era kolonial itu amat penting dalam lembaran sejarah Indonesia, namun masih kurang mendapat perhatian. Selain itu, juga karena berbagai persoalan otonomi daerah yang terjadi akhir-akhir ini, tampaknya tidak terlepas dari latar belakang sejarah daerah itu, terutama pada periode kolonial. Di samping itu, juga dapat menambah referensi atau nuasa lokal (Sulawesi Selatan) dalam sejarah nasional yang masih terasa sepi hingga kini. Kenyataan itulah yang mendorong saya untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Konflik dan Relasi Kekuasaan di Ajatappareng 1906-1942”.

Kajian tentang konflik dan relasi kekuasaan di Ajatappareng, sesungguhnya sangat kompleks. Sebab, tidak saja berkaitan dengan kepentingan politik, tetapi juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan sosial budaya. Namun, hal ini belum banyak mendapat perhatian dari peneliti dan sejarawan. Kajian yang ada tentang itu, hanya mengungkapkan secara sepintas, sehingga peristiwa itu belum terungkap secara utuh. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang latar belakang konflik, serta dinamika dan penyelesaiannya. Demikian pula relasi kekuasaan pasca konflik di wilayah Ajatappareng. Bertolak dari uraian itu, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah mengapa terjadi konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng serta bagaimana relasi kekuasaan pasca konflik di wilayah tersebut?

Secara tematik kajian ini dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal (Abdullah, 1985:310-323), dengan fokus perhatian pada konflik dan relasi kekuasaan di Ajatappareng 1906-1942. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu suatu proses penelitian yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah (Garraghan, 1975:33; Gottschalk, 1986:18). Pada intinya metode penelitian sejarah ini, terdiri atas *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber, baik berupa dokumen yang tersimpan di lembaga kearsipan maupun sumber tertulis lainnya berupa manuskrip lokal (*lontarak*), surat kabar, majalah, dan hasil penelitian); kritik (analisa sumber); interpretasi (penafsiran); dan historiografi (penulisan sejarah). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis. Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap kritik sumber (Notosusanto, 1978:17; Gottschalk, 1986:34). Hal ini dimaksudkan, tidak hanya untuk memastikan otentitas dan validitasnya, tetapi juga untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang objektif dan bermanfaat, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian kajian ini adalah penulisan naskah hasil kajian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar.

Berdasarkan studi kepustakaan bahwa terdapat sejumlah kajian tentang Ajatappareng, di antaranya Abd. Latif (2012), yang mengkaji tentang Konfederasi Ajatappareng 1812-1906. Kajian ini bertujuan menganalisis dinamika politik di Konfederasi Ajatappareng, baik sebelum maupun setelah kekuasaan Inggris dan Belanda di Sulawesi Selatan. Kajian yang memadukan sumber lokal (*lontarak*) dengan sumber arsip ini sangat membantu dalam memahami kehidupan sosial dan budaya politik orang Bugis, terutama dinamika kesejarahan di wilayah Ajatappareng. Sementara Stephen C. Druce (2009), mengkaji secara khusus lima kerajaan yang tergabung dalam Konfederasi Ajatappareng. Sumber utama yang digunakan oleh Stephen ialah manuskrip lokal (*lontarak*) dan tradisi lisan. Ia menguraikan letak geografis masing-masing kerajaan, baik

menyangkut pemukiman di sekitar aliran sungai maupun dataran rendah yang menjadi lahan pertanian padi sawah pada masing-masing kerajaan pada wilayah tersebut. Pendekatan geografi sangat membantu Stephen dalam menguraikan sistem politik dan terutama sistem ekonomi tradisional kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng.

Selain itu, terdapat pula beberapa tulisan tentang Ajatappareng dari aparat pemerintah kolonial Belanda. Misalnya, *Nota van Toelichting op het Contract, Gesloten met het Landschap Suppa, Sawitto, en Alitta (Adjataparang) op den October 1890* (Braam Morris) dan *Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteeken en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleden van het Landschap Sawito op 27^{STEN} Mei 1908*. Artikel ini memberikan informasi tentang kondisi geografis, penduduk, dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng, namun tidak menguraikan dinamika internal dan latar belakang konflik dengan pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, juga terhadap sejumlah karya tulis misalnya Mattulada tentang *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (1998); Muhammad Abduh tentang *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan* (1985); Edward L. Poelinggomang tentang *Sejarah Sulawesi Selatan* (2005); dan Muhammad Arfah, dkk. tentang *Biografi Pahlawan La Sinrang Bakka Lolona Sawitto* (1986); serta manuskrip lokal (*lontarak*), di antaranya *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, *Lontarak Akkarungeng Suppa*, dan *Lontarak Akkarungeng Alitta*. Meskipun manuskrip lokal ini memiliki kelemahan, namun di dalamnya juga terdapat sejumlah informasi yang penting, terutama menyangkut latar belakang kehidupan masyarakat dan dinamika internal kerajaan-kerajaan di Ajatappareng. Semua sumber tersebut menjadi rujukan dalam kajian ini.

PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Ajatappareng

Ajatappareng yang menjadi fokus kajian ini terdiri atas lima kerajaan yang terletak di sebelah barat Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya. Pada musim kemarau ketiga danau itu tampak terlihat dengan jelas, tetapi pada musim hujan ketiganya menyatu menjadi satu. Kelima kerajaan yang terletak di bagian tengah jazirah selatan Sulawesi dan sebelah barat ketiga danau itu adalah Kerajaan Suppa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Rappang, dan Kerajaan Alitta (Latif, 2012:52). Dalam perkembangannya, kelima kerajaan itu membentuk persatuan atau perjanjian kerjasama yang kemudian dikenal dengan persekutuan Lima Ajatappareng. Dalam istilah bahasa Bugis, Lima Ajatappareng terdiri atas sejumlah suku kata, yaitu *lima* (lima), *aja* (barat), dan *tappareng* (danau). Jadi pengertian dari Lima Ajatappareng adalah persekutuan lima kerajaan yang terletak di sebelah barat danau.

Suppa merupakan salah satu kerajaan yang terletak di bagian utara jazirah selatan Sulawesi, yaitu tepatnya di pesisir pantai Selat Makassar dalam wilayah Ajatappareng. Berbatasan dengan Sawitto di sebelah utara; Alitta dan Sidenreng di sebelah timur; Sidenreng dan Soppeng Riaja di sebelah selatan; dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas daerah ini belum diperoleh informasi atau data secara pasti. Namun menurut penafsiran, luasnya mencakup sekitar 100 *paal* persegi.³ Sebelum 1824, daerah pantai Bacukiki, Soreang, Bojo, Nepo, dan Palanro juga berada di bawah kekuasaan Suppa.⁴ Namun dalam perkembangannya daerah-daerah itu berubah menjadi wilayah kekuasaan Sidenreng. Perubahan itu antara lain karena daerah-daerah *palili* itu berhasil direbut Sidenreng yang bekerjasama dengan Inggris dalam perang melawan Suppa pada 1812. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda, Sidenreng juga membela Belanda dalam perang melawan Suppa pada 1824-1825. Itulah sebabnya daerah-daerah kemudian itu ditempatkan di

bawah kekuasaan Sidenreng sebagai *lili passiajingeng* (*Lontarak Akkarungeng Sidenreng*, hlm.2).

Sawitto juga merupakan salah satu kerajaan di wilayah Ajatappareng yang terletak di pesisir pantai bagian ujung paling utara jazirah selatan Sulawesi yang menghadap ke Selat Makassar. Kerajaan ini berbatasan dengan wilayah Tanah Toraja dan Massenrempulu (Kerajaan Duri, Kassa, dan Batulappa) di sebelah utara; Kerajaan Rappang, Kerajaan Alitta, dan Massenrempulu (Kerajaan Maiwa dan Enrekang) di sebelah timur; Kerajaan Suppa dan Alitta di sebelah selatan; dan Selat Makassar dan Kerajaan Binuang – Mandar (Sungai Binanga Karaeng) di sebelah barat. Luas kerajaan ini diperkirakan kurang lebih 200 *paal* persegi (Morris, 1890:213-214).⁵

Kerajaan lain yang memegang peranan penting di wilayah Ajatappareng adalah Sidenreng. Berbatasan dengan Massenrempulu (Enrekang) dan Luwu di sebelah utara; Wajo dan Luwu di sebelah timur; Soppeng dan Wajo di sebelah selatan; serta Alitta, Rappang, dan Suppa di sebelah barat. Luas kerajaan ini diperkirakan sekitar 200 *paal* persegi. Kerajaan Sidenreng terdiri atas sejumlah *wanuwa* dan daerah *palili*, yaitu Watang Sidenreng yang meliputi Lise, Guru, Teteaji, Masepe, Allakuang, Aratang, Arawa, dan Aliwuwu; *Lili Sidenreng* meliputi Amparita (*lili* yang pertama), Cirowali, Wanio, Wette, dan Bilokka; *Lili Pitu ri Awa* (tujuh *vassal* di bawah) meliputi Otting, Ugi, Jepu, Botto, Bulu Cenrana, Bilulang, dan Bila; *Lili Pitu ri Ase* (tujuh *vassal* di atas) meliputi Batu, Betoa, Kalompang, Paraja, Lamarang, Barangmamase, dan Baruku (Daeng Patunru, 2004:76-77; Amir, 2019:6).

Rappang juga merupakan salah satu kerajaan di Ajatappareng. Berbatasan dengan Massenrempulu (Enrekang) dan Sidenreng di sebelah utara; juga berbatasan dengan Sidenreng di sebelah timur dan selatan; serta Alitta dan Sawitto di sebelah barat. Luas kerajaan ini diperkirakan tidak melebihi 90 *paal* persegi. Rappang terdiri atas sejumlah kampung, yaitu Kulo, Benteng, Baranti, Panrong, Manisa, Dea, dan Simpo. Kerajaan yang terakhir adalah Alitta, merupakan kerajaan terkecil di Ajatappareng. Kerajaan ini berbatasan dengan Sawitto di sebelah utara; Sidenreng dan Rappang di sebelah timur, Sidenreng dan Suppa di sebelah selatan; serta Sawitto dan Suppa di sebelah barat. Luas Alitta diperkirakan sekitar 80 *paal* persegi. Kerajaan ini terdiri atas sejumlah kampung, yaitu Alitta (ibukota), Bompatuwe, Botta-e, Dolangnge, Sumpallang, Lamorange, Kariango, dan Pao (Morris, 1890:193-194).

Latar Belakang Konflik

Relasi kekuasaan antara pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan terdiri atas tiga kategori.⁶ Salah satunya yang sering menimbulkan konflik adalah kerajaan-kerajaan sekutu yang sering juga disebut *bondgenootschappelijke landen*. Berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667) kerajaan sekutu dinyatakan berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tetapi harus menempatkan penguasa Belanda sebagai “pelindung dan perantara”. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara penguasa lokal dengan pemerintah Belanda. Sebab bagi penguasa lokal, pernyataan kerajaan yang merdeka dan berdaulat menunjukkan pengakuan dari pihak pemerintah Belanda terhadap kedudukan kerajaan-kerajaan dalam derajat kesetaraan status. Sementara pengakuan atas kedudukan pemerintah Belanda sebagai pelindung dan perantara itu menempatkan dirinya sebagai protektorat terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Itulah sebabnya campurtangan pihak pemerintah Belanda dalam hubungan antarkerajaan, pemilihan dan pengangkatan penguasa baru, sering

dipandang sebagai usaha untuk menganeksasi sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.⁷

Konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng, bukan hal yang baru tampak pada awal abad ke-20. Tetapi jauh sebelumnya, yaitu sejak kehadiran dan usaha *VOC (Vreenigde Oost Indische Compagnie)* untuk menguasai perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17, tindakan penolakan atau perlawanan terhadap *VOC* senantiasa terjadi. Bahkan ketika pemerintah Hindia Belanda berusaha memulihkan kembali kedudukan kekuasaan kolonialnya pada awal abad ke-19, Kerajaan Suppa, Sawitto, Alitta, dan Rappang menentang sehingga terjadi konflik antara kedua belah pihak pada 1824-1825. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan itu, sehingga terpaksa menandatangani pembaharuan Perjanjian Bungaya pada 11 Agustus 1825 (Sumber Arsip, 1854: 178; Stuers, 1854: 388)

Pada awal tahun 1900-an, pemerintah Hindia Belanda di Makassar mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu bahwa kebijakan “pelabuhan bebas” akan dihapuskan,⁸ dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan. Ganti rugi itu pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentu saja kerajaan-kerajaan sekutu menolak kebijakan tersebut karena akan menyapakan sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka. Sikap kerajaan-kerajaan itulah yang antara lain menyebabkan kebijakan pelabuhan wajib pajak di Makassar tertunda.⁹

Sehubungan dengan itu, Gubernur Sulawesi, C. A. Kroesen, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang menentang kebijakan pelabuhan wajib pajak.¹⁰ Itulah sebabnya ketika J. B. van Heutsz tampil menggantikan Willem Roosenboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Van Heutsz memberikan label kebijakannya itu yang secara halus disebut sebagai politik perdamaian (*pacificatie politiek*). Sesungguhnya kebijakan ini dirancang untuk menguasai sepenuhnya atas wilayah Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan.

Dalam rangka merealisasikan kebijakan wajib pajak di Sulawesi Selatan, Menteri Koloni memberikan saran bahwa dalam perundingan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat tentang jumlah ganti rugi dan apabila tidak tercapai kesepakatan, jangan mengakhiri perundingan penyelesaian dengan mereka. Mengikuti pernyataan Menteri Koloni tersebut, Gubernur Jenderal Van Heutsz, dalam suratnya kepada Direktur Departemen Keuangan (tertanggal 25 Januari 1905), menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, maka secepat mungkin dilakukan kontrak dengan penguasa kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengambil alih hak pajak perdagangan, dan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta segera mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan maka kerajaan-kerajaan berdaulat harus bersedia mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka (Poelinggomang, 2002:92).

Kegagalan perundingan yang mereka alami, mendorong Van Heutsz

mencanangkan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer. Untuk itu, dipersiapkanlah suatu pasukan ekspedisi militer, guna menaklukkan dan memaksa kerajaan-kerajaan yang menolak memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Sulawesi C. A. Kroesen mengajukan kepada Van Heutz pada April 1905, agar dilakukan tindakan penaklukan terhadap sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Menurut C. A. Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Hindia Belanda, dan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa lokal, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan” (Kroesen, 1906:9).

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jenderal Van Heutz memperingatkan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya gerakan perlawanan atau menghindari kesan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mencari-cari alasan untuk menguasai secara langsung seluruh Sulawesi Selatan (Kroesen,190:10).¹¹ Setelah perundingan dengan para penguasa lokal menemui jalan buntu, maka diputuskan untuk melancarkan ekspedisi militer di Sulawesi Selatan. Karena mereka dianggap gagal memenuhi kewajiban menurut perjanjian atau dianggap telah melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani (Kroesen, 1906:11; Sumber Arsip, 1908:78). Itulah sebabnya pemerintah Hindia Belanda segera memerintahkan pemberangkatan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan yang tidak bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan. Ekspedi militer Belanda yang kemudian dikenal dengan *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905-1906* itu, mendapat perlawanan dari sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan-kerajaan di Ajatappareng.

Ekspedisi militer dari pemerintah Hindia Belanda tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan politik pasifikasi hanyalah sebuah kedok. Mereka sesungguhnya hendak menguasai sepenuhnya seluruh Sulawesi Selatan (Kielstra,1910:357).¹² Hal ini tampak jelas dalam surat dikirim kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen tertanggal 14 Juli 1905, untuk melakukan tindakan penaklukan dan menguasai secara langsung seluruh Sulawesi Selatan. Pada intinya, surat itu berisi perintah kepada gubernur untuk memaksa semua penguasa atau raja-raja di daerah ini agar menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Belanda dengan menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek).¹³

Dinamika Konflik dan Solusinya

Konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng, bermula ketika terjadi peristiwa di Jampue pada awal 1905, yaitu perselisihan antara I Kasong Karaeng Allu¹⁴ dengan Daeng Mogontang¹⁵ Sesungguhnya perselisihan itu dilatarbelakangi oleh persaingan dalam mengontrol perdagangan di pelabuhan Jampue. Meskipun mendapat dukungan dan bantuan dari Sawitto, Suppa, dan Alitta, tetapi Karaeng Allu tidak berhasil menumpas perompakan dan menghentikan perdagangan budak yang dilakukan Daeng Magontang di Jampue. Karena itu, Karang Allu meminta bantuan secara langsung kepada Raja Gowa I Makkulau Karaeng Lembangparaang, tanpa persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda (Anonim,1910:77).

Raja Gowa merespon permintaan itu dengan mengirimkan bantuan pasukan sebanyak 400 orang dan 100 di antaranya bersenjatakan senapan. Pasukan bantuan ini di bawah pimpinan Karaeng Bontonompo dan kedua putra raja Gowa, yaitu La Panguriseng Arung Alitta dan La Mappanyukki Daru Suppa. Mereka berangkat melalui laut dengan menggunakan perahu pada 21 Februari 1905 dan tiba di Jampue dua hari

berikutnya. Karena itu, pemerintah Belanda segera mengirimkan pasukan bersenjata sebanyak 45 orang tentara di bawah pimpinan Residen Brugman untuk mencegah terjadinya pertempuran di Jampue. Pasukan Belanda berhasil menyita lima perahu dan menangkap 150 pasukan Gowa bersama tiga orang pemimpinnya. Mereka segera dikembalikan ke Makassar dan sebagai tebusan pemerintah Belanda meminta uang pembebasan sebanyak 10.800 gulden (Anonim,1910:78; Arfah,1993:84).

Jika dicermati lebih jauh tentang peristiwa di Jampue dan perkembangan selanjutnya, maka tampak bahwa pemerintah Belanda menjadikan peristiwa itu sebagai salah satu alasan untuk melancarkan serangan terhadap Sawitto dan Gowa. Demikian pula terhadap pemberantasan perompak, perdagangan gelap, dan perdagangan budak, tampaknya hanya kedok belaka, sebab pemerintah Belanda seharusnya tidak mencegah pasukan Gowa yang hendak membantu Karaeng Allu dalam menumpas aktivitas Daeng Magontang di Jampue. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persolan perompakan dan perdagangan budak hanya merupakan alasan bagi pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan Jampue dan keterlibatan Sawitto dan Gowa dalam peristiwa di Jampue dijadikan alasan untuk menaklukkan kedua kerajaan tersebut.

Campurtangan pemerintah Hindia Belanda dalam persoalan di Jampue, memicu terjadinya konflik dengan kerajaan-kerajaan di Ajattappareng, terutama Sawitto, Suppa, Alitta. Terlebih setelah ketiga kerajaan itu memutuskan secara sepihak dan mengembalikan kontrak politik kepada pemerintah Belanda pada 18 Mei 1905. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Maiwa, salah satu kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Massenrempulu. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak lagi terikat perjanjian dengan pemerintah Belanda, yang sebelumnya mereka dianggap sebagai sekutu. Namun tindakan itu menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Belanda melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan di Ajattappareng. Itulah sebabnya pemerintahan Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke Ajatappareng dengan sasaran pendaratan di Parepare dan Jampue pada 1905 (Anonim,1910:78; Arfah, dkk. 1996:119).

Kehadiran pasukan Belanda di pantai Jampue itu, memicu semangat perlawanan laskar Ajatappareng secara terbuka. Mereka senantiasa mempersiapkan diri dalam menyambut atau memberikan perlawanan terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Sejak itu, konflik antara laskar Ajatappareng yang dipimpin oleh Addatuang Sawitto La Tamma bersama kelompok aristokrat lainnya dengan pemerintah Belanda semakin meningkat. Itulah sebabnya La Tamma mengangkat putranya yang bernama La Sinrang untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda. Berkat keberanian dan kepemimpinannya dalam perlawanan menentang kekuasaan pemerintah Belanda, ia kemudian mendapat gelar dari masyarakat dengan *Bakka Lolona Sawitto* (Side,1992:63; Ibrahim,1996:53).

Pada akhir September 1905, pasukan Belanda dengan kekuatan sekitar 20 buah perahu dengan jumlah pasukan sekitar 600 orang lengkap dengan senjata, baik senjata ringan maupun berat mendarat di pantai Jampue. Residen Brugman segera mengirim utusan dan ultimatum kepada Addatuang Sawitto La Tamma pada 29 September 1905, agar menandatangani *korte verklaring*. Karena itu Addatuang Sawitto terpaksa menandatangani *korte verklaring*. Namun dewan adat dan panglima perang Sawitto menolak, sehingga pasukan Belanda dikerahkan untuk melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan laskar Ajatappareng di Jampue (Arsip Kolonial Verslag,1905; Anonim,1910:79; Arfah, dkk. 1996: 102).

Meskipun laskar Ajatappareng memberikan perlawanan atas serangan itu, pasukan

Belanda berhasil menerobos pertahanan musuhnya di pesisir pantai Jumpue. Oleh karena itu, laskar Ajatappareng mundur secara teratur untuk melanjutkan perjuangan dan mengatur strategi perlawanan dengan sistem perang gerilya, yaitu menyerang musuh di saat lengah dan mundur di saat musuh menyerang. Dengan mundurnya laskar Ajatappareng, pasukan Belanda berhasil menduduki Jumpue, sehingga terbukalah jalan bagi pasukan Belanda untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke pusat kerajaan. Namun ketika pasukan Belanda mencoba melancarkan serangan ke pusat kerajaan untuk menangkap Addatuang Sawitto, pasukan pengawal (*passiuno*) La Tamma bersama laskar yang dipimpin oleh La Sinrang memberikan perlawanan, sehingga terjadilah pertempuran di Tanra Assona pada awal Oktober 1905 (Anonim,1910:79).¹⁶

Perang gerilya yang dilancarkan oleh laskar Ajatappareng dalam menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, semakin memuncak setelah ekspedisi militer Belanda berhasil mengalahkan Bone (Beddungolo,2011:85; Amir,2003:86). Sebab pemerintah Belanda semakin meningkatkan kegiatan pasukan militernya di Parepare. Bukan saja karena laskar Bone yang tidak bersedia menyerah, menggabungkan diri ke dalam laskar Ajatappareng, tetapi juga karena Raja Gowa Sultan Husain bersama pengikut-pengikutnya telah berada di Alitta dan menjalin kerjasama dengan laskar Ajatappareng.¹⁷ Hal ini tentu saja semakin mengobarkan semangat juang laskar Ajatappareng, sebab La Mappanyukki yang senantiasa mendampingi ayahnya (Raja Gowa Sultan Husain), baik dalam pengungsian maupun dalam pengejaran pasukan militer Belanda, adalah sebagai Datu Suppa. Sedangkan saudaranya La Panguriseng sebagai Arung Alitta (Arfah, dkk. 1996: 122; Mattulada,1998:386).

Sementara itu, pasukan Belanda lainnya dikerahkan untuk menaklukkan Kerajaan Sidenreng dan Rappang. Sebab kedua kerajaan ini bukan hanya menolak *korte verklaring*, melainkan juga terlibat atau telah membantu Bone dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda. Penolakan itu sesungguhnya juga tidak terlepas dari kekecewaan Addatuang La Sadapotto atas tidak diperpanjangnya peminjaman Parepare dari pemerintah Hindia Belanda kepada Addatuang Sidenreng.¹⁸ Di Parepare terletak pelabuhan Parepare yang dapat menghubungkan langsung antara Ajatappareng dengan beberapa pelabuhan lainnya di Nusantara. Aktivitas ekspor dan import di Ajatappareng umumnya melalui pelabuhan Parepare. Bahkan kopi dari Toraja dan Enrekang banyak yang diekspor melalui pelabuhan Parepare (Latif, 2012:183).

Pada 26 September 1905, pasukan Belanda di bawah pimpin oleh Letkol Bennekom bersama Residen Brugman, dengan kekuatan tiga kompi pasukan infantri dan dua kompi marsose yang berkedudukan di Parepare mulai melancarkan serangan militer terhadap Kerajaan Rappang dan Sidenreng. Meskipun laskar Ajatappareng di bawah pimpinan oleh La Sadapotto dan La Parenrengi memberikan pelawanan atas serangan itu, pasukan Belanda berhasil menduduki Rappang pada 27 September dan Tonronnge pada 28 September 1905. Kemudian pasukan Belanda berhasil pula menduduki Tjarawali, Barantik, Mario, dan Talangtalang pada 30 September 1905. Demikian pula pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Stipriaan Luiscius yang bertugas mengejar Raja Bone La Pawawoi berhasil memasuki Sidenreng dan bergerak menuju Rappang pada 6 Oktober 1905 (Anonim,1916:258-260; Abduh, 1985:127).

Untuk menahan laju gerakan pasukan Belanda yang hendak menduduki ibu kota Kerajaan Sidenreng di Allakuang, La Sadapotto memusatkan pertahanan laskar Ajatappareng di Lajawa. Ketika itu, salah seorang pimpinan laskar Ajatappareng yang bernama Pabbicara Ambona La Baju bersumpah, bahwa "*Sangadi pallipaputea natama Balandae ri Sidenreng*" (Belanda tidak akan masuk di Sidenreng sebelum saya meninggal dunia). Pada

21 Oktober 1905, pasukan Belanda dengan kekuatan besar menyerang pertahanan laskar Ajatappareng di Lajawa, Kape, dan Allakuang, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dielakkan. Pada pertempuran di Lajawa menelan banyak korban, termasuk Pabbicara Ambona La Baju gugur. Pasukan Belanda berhasil menduduki Allakuang pada 22 Oktober 1905. Atas kekalahan itu, La Tjibu putra La Sadapotto mewakili Addatuang Sidenreng dan We Nyilitimo Arung Baranti mewakili Arung Rappang terpaksa menandatangani *korte verklaring* pada 25 Oktober 1905. Oleh karena La Sadapotto Addatuang Sidenreng merangkap Arung Rappang menolak kehadiran pemerintah Hindia Belanda (Pemda,1991:192; Paeni, 1985:110 dan 137).

Meskipun demikian, laskar Ajatappareng yang tidak bersedia menyerah kepada musuh, tetap melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Tercatat sejumlah pimpinan laskar Ajatappareng yang tetap melanjutkan perlawanan, misalnya La Pakkana dan La Noni yang menjalin kerjasama dengan La Sinrang. Sementara itu, pada awal Desember 1905, pemerintah Hindia Belanda berhasil memperoleh informasi bahwa Sultan Husain bersama pengawalnya telah bergabung dengan laskar Ajatappareng yang dipimpin oleh La Sinrang. Karena itu, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christoffel yang senantiasa melakukan pengejaran terhadap La Sinrang, terlibat serangkaian pertempuran dengan laskar Ajatappareng. Salah satunya adalah pertempuran di Bukero, Alitta pada 21 Desember 1905. Pada pertempuran itu La Panguriseng Arung Alitta, Karaeng Allu, bersama 17 orang laskarnya gugur. Sementara I Mangimangi Karang Bontonompo terluka parah, sehingga tidak dapat meloloskan diri dan tertangkap oleh pasukan Belanda (Arfah,1993:92; Amir, 2007: 158).

Sultan Husain juga terluka parah pada pertempuran di Bukero, namun ia berhasil meloloskan diri. Pada 25 Desember 1905, pasukan Belanda berhasil mengepung Sultan Husain di Warue (Sidenreng), sehingga kembali terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Pada pertempuran itu Sultan Husain gugur bersama dua orang pengawalnya. Sementara La Sinrang dan La Mappanyukki berhasil meloloskan diri dan meneruskan perjuangannya melalui perang gerilya. La Mappanyukki kemudian berhasil ditangkap dalam perjalanan untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Hindia Belanda di Parepare pada Januari 1906. La Parenrengi Karaeng Tinggi Mae, mertua La Mappanyukki kemudian menandatangani *korte verklaring* pada 21 Januari 1905. Demikian pula dengan La Sinrang berhasil ditangkap pada 10 Juni 1906. Dalam hal ini pasukan Belanda terlebih dahulu menangkap ayahnya (Addatuan Sawitto La Tamma) dan istri La Sinrang yang bernama Makkanyuma dengan ancaman keduanya akan dibunuh apabila La Sinrang tidak menyerahkan diri (Anonim,1910:79; Mattulada,1998: 388; Amir,2007:163).

Relasi Kekuasaan

Pemerintah Hindia Belanda mulai menata wilayah dan kekuasaan pemeritahan kolonialnya, setelah berhasil mematahkan gerakan perlawanan sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi H.A.N. Swart tertanggal 31 Desember 1906 No. 6041/2. Surat keputusan tentang penataan pemerintahan itu bersifat sementara, sambil menanti keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara resmi. Penataan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan baru terselenggara setelah dikeluarkannya peraturan penataan pemerintahan yang diundangkan dalam lembaran negara (*staatsblad*) 1910 No. 573 yang dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1911. Pada dasarnya keputusan yang termuat dalam lembaran negara itu sama dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi H.A.N. Swart pada tanggal 31

Desember 1906 No. 6041/2.

Berdasarkan peraturan tersebut, wilayah Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sekarang) dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Kepala pemerintahan diembankan kepada seorang pejabat pemerintahan yang disebut gubernur. Wilayah ini dibagi ke dalam tujuh afdeling (bagian pemerintahan), yaitu Afdeling Makassar, Afdeling Bonthain, Afdeling Bone, Afdeling Parepare, Afdeling Luwu, Afdeling Mandar, dan Afdeling Buton dan Pesisir Timur Sulawesi. Di bagian pemerintahan (afdeling) ditempatkan seorang asisten residen yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah tersebut. Bagian pemerintahan (afdeling) dibagi ke dalam beberapa onderafdeling atau cabang pemerintahan (*Staatblad*, 1910, No.573).

Afdeling Parepare bukan hanya meliputi wilayah kerajaan-kerajaan di Ajatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta), melainkan juga kerajaan-kerajaan di wilayah Massenrempulu, Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja. Pusat pemerintahan Afdeling Parepare berkedudukan di Parepare. Wilayah Afdeling Parepare dibagi ke dalam lima cabang pemerintahan yang disebut onderafdeling: yaitu Onderafdeling Parepare meliputi wilayah bekas Kerajaan Suppa dan Mallusetasi; Onderafdeling Pinrang meliputi wilayah bekas Kerajaan Sawitto, Kassa, dan Batulappa; Onderafdeling Sidenreng Rappang meliputi wilayah bekas Kerajaan Sidenreng dan Rappang; Onderafdeling Barru meliputi wilayah bekas Kerajaan Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja; dan Onderafdeling Enrekang meliputi wilayah bekas Kerajaan Maiwa, Enrekang, Malua, Alla, dan Buntubatu (*Staatblad*, 1916, No.352; *Staatblad*, 1917, No.249)

Pada awal pelaksanaan pemerintahan di wilayah pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya setelah ekspedisi militer adalah bentuk pemerintahan sipil-militer. Bentuk pemerintahan ini didasarkan pada surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 9 Juli 1906. Pelaksanaan pemerintahan sipil-militer diembankan kepada H.A.N. Swart, yang tampil menggantikan C.A. Kroesen (1903-1906) sebagai gubernur Sulawesi pada 3 September 1906 (Swart,1908: MvO;Paeni,1985:137). Swart adalah seorang anggota militer dari pasukan infantri yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel. Untuk melaksanakan pemerintahan, Gubernur Swart mengukuhkan setiap komandan pasukan menjadi pimpinan pemerintahan yang berada di wilayah afdeling sebagai asisten residen dan di daerah onderafdeling sebagai kontrolir.

Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan kekuasaan Hindia Belanda yang pada waktu itu belum stabil mengingat masih terdapat kelompok yang menentang. Selain itu, juga untuk menjaga kemungkinan munculnya perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan akibat beralihnya kekuasaan ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Bangsawan yang memberikan tanggapan penolakan dan perlawanan dikejar, ditangkap dan ditawan, jika perlu diasingkan dengan alasan demi ketenteraman dan keamanan. Bangsawan yang tidak menunjukkan tanggapan penolakan dan perlawanan senantiasa diawasi gerak langkah mereka. Sementara bangsawan yang bersedia menjalin kerjasama dilindungi dan diperbaiki kedudukannya (Poelinggomang, 2004:97). Namun tindakan terhadap kelompok bangsawan itu, terkadang mendapat kebijakan yang berbeda dari pimpinan pemerintahan pada suatu daerah.

Pada setiap afdeling ditempatkan seorang pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai asisten residen. Ia dibantu oleh beberapa orang pembantu, antara lain seorang aspiran kontrolir dan seorang juru tulis. Asisten residen bertanggungjawab terhadap segala urusan pemerintahan di wilayah kekuasaannya dan mempertanggungjawabkan kepada gubernur, yang kemudian kepada residen setelah terjadi perubahan struktur pena-

taan pemerintahan Hindia Belanda pada 1938. Asisten residen membawahi beberapa pejabat kontrolir, yang masing-masing ditempatkan sebagai pimpinan pemerintahan pada cabang pemerintahan (*onderafdeling*). Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat *onderafdeling*, kontrolir menerima dan melaksanakan segala perintah, peraturan dan ketentuan yang diembankan kepadanya oleh asisten residen (Pemda, 1991:169).

Kontrolir merupakan pejabat pelaksana pemerintahan Belanda yang langsung berhubungan dengan pejabat pemerintahan bumiputra dan mengawasi segala pelaksanaan pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia juga menguasai kas *onderafdeling*, memimpin pasukan polisi, melakukan pengaturan pemungutan pajak, menentukan kerja wajib, melakukan pengadilan, dan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan. Di samping itu, ia juga bertindak sebagai penasihat dalam segala hal yang terjadi dalam wilayah pemerintahannya. Dengan kata lain kontrolir merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dibantu oleh beberapa orang pegawai bumiputra, seorang jaksa, juru tulis, dan juru bicara. Pegawai bumiputra tersebut berperan sebagai penghubung antara kontrolir dan pejabat pemerintah bumiputra (Venema, 1949: 293; Poelinggomang, 2004:98).

Setiap *onderafdeling* dibagi ke dalam beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang pejabat bumiputra yang disebut kepala distrik. Karena itu kontrolir membawahi beberapa pejabat bumiputra yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan pada tingkat distrik (*district*) atau yang kemudian lebih dikenal dengan daerah adat atau *adat gemeenschap* (*Staatblad* 1916 No. 352). Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, distrik merupakan wilayah pemerintahan bagi pejabat pemerintahan bumiputra dan bagian dari *onderafdeling*. Penentuan distrik pada umumnya didasarkan pada latar belakang sejarah dari suatu daerah sebagai satu kesatuan pemerintahan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan bangsawan di daerah itu dalam melaksanakan pemerintahan. Karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha memperkuat kedudukan pemerintahan distrik serta menjauhkan kedudukan penguasa pusat kerajaan atau memangkas relasi kekuasaan raja dan bangsawan pada pusat kerajaan terhadap distrik.

Relasi kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda bukan hanya mengalihkan ketergantungan, kesetiaan dan hubungan kepala distrik dengan raja atau bangsawan pada pusat kerajaan dari bentuk pemerintahan lokal sebelumnya. Melainkan juga memberikan kemungkinan bagi kepala distrik atau bangsawan di daerah itu merasakan ketergantungannya dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Perubahan ini jelas memutuskan relasi kekuasaan langsung antara raja, pejabat pusat kerajaan, dan lapisan istana di satu pihak dengan penguasa pada tingkat distrik atau *wanuwu* dan rakyatnya di pihak lain. Itulah sebabnya pada awal kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, banyak mendapat tanggapan penolakan dan perlawanan dari bangsawan pada pusat kerajaan.

Tindakan penolakan dan perlawanan tersebut, mendorong pemerintah Hindia Belanda kembali mendekati kelompok bangsawan pusat kerajaan yang selama ini berhasil ditekan dan disingkirkan, untuk menjalin hubungan kerjasama. Selain itu, juga dimaksudkan untuk dapat mencegah keterlibatan kelompok bangsawan dalam kegiatan organisasi sosial dan politik yang mulai berkembang di Sulawesi Selatan pada tahun 1920-an. Sebab kegiatan organisasi sosial dan politik ini dipandang dapat mengancam kedudukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Untuk dapat menjalin hubungan kerjasama, pemerintah Hindia Belanda bukan hanya pemulihan kembali relasi kekuasaan dengan bangsawan pusat kerajaan, melainkan juga kekedudukan bekas kerajaan menjadi daerah kekuasaan berperintahan sendiri yang dikenal dengan *swapraja*. Kerajaan-kerajaan

di wilayah Ajatappareng dipulihkan kembali kedudukannya menjadi daerah kekuasaan berpemerintahan sendiri atau swapraja pada 1926 dan berlangsung hingga 1942.¹⁹

KESIMPULAN

Konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng pada awal abad ke-20, bukan hanya dilatari oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga oleh kepentingan politik. Konflik itu bermula ketika pemerintah Hindia Belanda hendak menghapuskan kebijakan pelabuhan bebas dan menerapkan kebijakan pelabuhan wajib pajak. Selain itu, juga karena pemerintah Belanda bermaksud menguasai secara langsung kerajaan-kerajaan di Ajatappareng. Penguasaan secara langsung itu, bukan hanya dimaksudkan untuk lebih mengokohkan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial, melainkan juga untuk menguasai sumber daya ekonomi yang potensial bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Juga untuk mencegah masuknya pengaruh bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan diajukannya *korte verklaring* (pernyataan pendek), yaitu pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena *korte verklaring* itu ditolak, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengirimkan pasukan militernya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng.

Serangan militer yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut, memicu terjadinya konflik berupa perang terbuka antara laskar Ajatappareng dengan pasukan Belanda pada 1905-1906. Meskipun laskar Ajatappareng memberikan perlawanan sengit atas serangan militer Belanda itu, tetapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda. Atas kekalahan itu, kerajaan-kerajaan di Ajatappareng harus menerima kenyataan tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Implikasi dari pernyataan itu adalah: 1) lenyapnya kedudukan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng; 2) seluruh wilayah kerajaan di Ajatappareng menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda; 3) penguasa lokal (para bangsawan) kehilangan kedudukan kekuasaan mereka; dan 4) awal dari pemerintahan Hindia Belanda di Ajatappareng.

Setelah berhasil menguasai seluruh kerajaan di Ajatappareng dan Sulawesi Selatan pada umumnya, pemerintah Hindia Belanda mulai menata kedudukannya dan tetap menggunakan nama Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (*Gouvernement Celebes Onderhoorigheden*). Pemegang kendali kekuasaan pemerintahan diembankan kepada seorang gubernur (*gouverneur*) atau residen setelah terjadi perubahan struktur penataan pemerintahan Hindia Belanda pada 1938. Wilayah pemerintahan ini dibagi atas tujuh afdeling yang masing-masing dijabat oleh seorang asisten residen. Setiap afdeling terbagi atas beberapa onderafdeling. Untuk Afdeling Parepare terdiri atas lima onderafdeling dan setiap onderafdeling dijabat oleh seorang kontrolir (*controleur*) atau *gezaghebber*. Setiap onderafdeling terbagi atas beberapa distrik (*district*) atau daerah adat (*adat gemeenschap*) yang dipimpin oleh seorang kepala distrik. Setiap distrik terbagi pula atas beberapa kampung (*wanuwa*) dan setiap kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.

Pejabat pemerintahan pada tingkat gubernur hingga kontrolir dijabat oleh pegawai orang Belanda. Sementara pejabat pemerintahan baik kepala distrik maupun kepala kampung dijabat oleh pegawai bumiputra. Hal ini menunjukkan bahwa bangsawan pada pusat kerajaan tersisihkan dalam birokrasi pemerintahan Hindia Belanda atau dengan kata lain bangsawan kerajaan kehilangan kedudukan kekuasaan dalam birokrasi kolonial Belanda. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada bangsawan kerajaan,

yang kehilangan kedudukan politik dan sumber-sumber ekonomi atau kesejahteraannya yang selama itu berada dalam kewenangan mereka. Melainkan juga pada sebagian orang merdeka yang merupakan pengikut dari bangsawan, yang bergantung pada lahan pertanian yang dikuasai oleh kaum bangsawan.

Pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut, mendapat respon dari kelompok bangsawan kerajaan yang kehilangan kedudukan kekuasaan. Tidak dapat dielakkan pihak yang terakhir merasa dirugikan dan tidak puas dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Untuk membendung tindak perlawanan atau tanggapan penolakan, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pemerintahan sipil-militer untuk memperkuat kedudukan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menunjukkan tanggapan penolakan dan bersikap menentang. Mereka ditawan dan jika dipandang perlu diasingkan, misalnya La Sinrang yang diasingkan ke Jawa Timur dan La Mappanyukki ke Pulau Selayar.

Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil itu dilakukan dengan menetapkan dan mengangkat komandan pasukan menjadi kepala pemerintahan pada daerah yang ditaklukkannya. Penempatan dan pengangkatan itu jelas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah kolonial bukan merupakan pejabat yang berpengalaman dan memiliki wawasan pengetahuan di bidang pemerintahan. Karena itu relasi kekuasaan antara pejabat Belanda dengan pejabat bumiputra tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam memaksakan rakyat untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Itulah sebabnya mereka kembali mendekati kelompok bangsawan kerajaan yang selama ini berhasil ditekan dan disingkirkan, untuk menjalin hubungan kerjasama. Jalinan kerjasama inilah yang melapangkan pemulihan kembali kedudukan bekas kerajaan-kerajaan di Ajatappareng menjadi daerah kekuasaan berperintahan sendiri yang dikenal dengan swapraja pada 1926 dan berlangsung hingga 1942.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir, Muhammad. 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia.
- Amir, Muhammad. 2007. *I Makkulau Sultan Husain Profil Patriot Yang Konsekuen Hingga Tetasan Darah Terakhir*. Makassar: Eramedia.
- Anonim. 1905-1906. "De Gubeurtenissen in Zuid-Celebes", dalam *Weekblad voor Indie 2*.
- Anonim, 1910. Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteekend en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleten van het Landschap Sawito op 27 sten Mei 1908, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Jilid LII*.
- Anonim. 1915. "De Expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-06", dalam *Indisch Militair Tijdschrift, Extra Bijlage*.

- Arfah, Muhammad. 1993. *Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Profil Nasionalis dan Patriotik Sejatai yang Konsekuen Terhadap Republik Indonesia*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arfah, Muhammad, dkk. 1996. *Biografi Pahlawan: La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrsang*, Makassar: Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arsip Kolonial Verslag over het jaar 1905. *Celebes en Onderhoorigheden*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Beddungolo, Mahira. 2011. "Perlawanan Bone Terhadap Kolonialisme Belanda Tahun 1905". Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Daeng Patunru, Abdurrazak. 2004. *Bingkisan Panturu: Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Druce, Stephen C. 2009. *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. Leiden: KITLV.
- Gottschalk, Louis 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Ibrahim, Syarifuddin. 1996. *Mengenal Sejarah Perjuangan La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang*.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Prop. Sulawesi Selatan dengan Unhas.
- Kielstra, E. B. 1910. *Indisch Nederlandsch Geschiedkundige Schetsen*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Kroesen, C. A. 1906. *Memori van Overgave van het Bestuur Over het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Latif, Abd. 2012. "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906: Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan". Bangi: Disertasi Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Lontarak Akkarungeng Alitta; Lontarak Akkarungeng Sawitto; Lontarak Akkarungeng Suppa; dan Lontarak Akkarungeng Sidenreng*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Lontarak Sidenreng*. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Morris, D.F. van Braam. 1890. Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Suppa, Sawieto en Alitta (Adjataparang) op den 30 Sten Oktober

1890, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Tahun 1893, Jilid XXXVI*.

- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Paeni, Mukhlis, dkk. 1985. *Sejarah Sidenreng Rappang*. Ujung Pandang: Laporan Penelitian, Kerjasama Unhas dengan Pemda Sidrap.
- Pemda. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Side, Syarifuddin. 1992. "La Sinrang Tokoh Pejuang Sawitto 1875-1938: Suatu Analisa Historis". Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas.
- Somer, J. M. 1934. *De Korte Verklaring*. Breda: Corona.
- Sumber Arsip. 1854. *Bijdragen tot de Geschiedenis van Celebes, dalam Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (TNI), Jilid II*.
- Sumber Arsip. 1905. *Rapport van het Departement van oorlog No. 1/VII, bijlagen: Afschrift dagboek van Collonne Helderling van met 23 October tot en met 26 October 1905*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sumber Arsip. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Djakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 5.
- Staatblad*, 1910, No. 573; *Staatblad*, 1916, No. 352; dan *Staatblad*, 1917, No.249. *Nederlandsch Indie*.
- Stuers, H. van de. 1854. *De Expeditie Tegen Tanette en Soepa in 1824, dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie (TNI), Volume 59*.
- Swart, H.A.N. 1908. *Memori van Overgave Gouvernement Celebes en Onder-hoorigheden*, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Venema, R. 1949. *Tendentie in het na Oorlog Staatsrecht de Lagere Recht-gemeenschappen in Indonesia*.

CATATAN AKHIR

1. Pada dasarnya isi *korte verklaring* tersebut, ialah pernyataan kesetiaan kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, setuju untuk tidak mengadakan hubungan dengan kekuatan-kekuatan asing, dan berjanji untuk melaksanakan semua peraturan dan perintah yang sudah atau mungkin akan ditetapkan oleh Ratu, Guber-

- nur Jenderal atau wakilnya. Dari pernyataan itu, tampak dengan jelas bahwa pemerintah Hindia Belanda bermaksud untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
2. Dalam perkembangannya Kerajaan Bone, Wajo, dan Tanete berubah menjadi kerajaan pinjaman (*leen voerstendom*).
 3. Satu *paal* sama dengan 1.506 meter. Daerah ini terdiri atas sejumlah *wanuwa* atau kampung, yaitu Watang Suppa (ibukota kerajaan), Ta-e, Majanna-e, Barangkasanda, Cekeala, La Tamapa, Ladea, Lompo-e, Garassi, Belabelawa, Sabbamparu, Mangarabombang, Lompo-menralang, Polewali, dan Ujung Lero. Selain *wanuwa-wanuwa* itu, daerah Suppa juga meliputi pulau-pulau yang terletak di Teluk Parepare, yang terdiri atas Pulau Kamarang, Dapo, dan Laowakoang, namun hanya Pulau Kamarang yang berpenghuni (Morris, 1890:202-203)
 4. Dalam *lontarak* antara lain disebutkan bahwa *lili Nepo\lili Palanro\lili Bacukiki\lili Bojo sibawa lili Soreang\iyandaritu lili paduwisena Suppa* (*Lontarak Akkarungeng Sidenreng* hlm. 2).
 5. Kerajaan Sawitto terdiri atas sejumlah *wanuwa* dan daerah *palili*: (a) Daerah Sawitto, yang mencakup ibukota Sawitto dan *wanuwa* atau kampung Tanreasona, Paserang, Ulutedong, Pacongong, Senga-e, Tallang, Patobong, La Palapo, Uncu-e, Lura-e, Lese-tana, Palia-e, Dolangange, Pao, Ruba-e, Sarempo, Awang-Awang Purung, Kacampi, Soro-e, Ulo, Barana, Ka-e, Kanari-e, Labalakang, Ujungnge, Paladange, Salo Poko-e, Gucia, Libukang, Liku, Sulilia, Lalatieng, Bila, Penrang, Lamani, Bonging, dan Totenana; (b) *Liliq-passeajengeng* atau *vassal* dari persahabatan atau kekerabatan: Tirowang, Rangamea atau Jampu-e, Lolowang dan Langnga yang semuanya disebut juga empat *bate-bate* (bendera). Selanjutnya Kabalangan, Lome, Kalupong, Panga-parang, Kadokong, dan Galangkalang yang seluruhnya disebut *lili basi* atau enam *lem-bang*; (c) *Lili-no-rakkalana* yang juga disebut *lili-e-ri-lalang*: Cempa, Madalo, Paria, Talabangi, Urung, Malimpung, Padangkalawa, Kaba, Punia, Peso, Sekang, Bulu, Bua, Salo, Tampio, Paletang, dan Lempanjang.
 6. *Kategori pertama* adalah negeri-negeri yang dikuasai dan diperintah secara langsung yang disebut “wilayah pemerintahan” (*gouvernement landen*). Pada dasarnya negeri-negeri ini diduduki pada waktu Perang Makassar (1666-1669) dan diperintah secara langsung. Negeri-negeri yang masuk kategori ini adalah Distrik Makassar (*District van Makassar*), Distrik-distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) yang meliputi daerah Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Pelaksanaan pemerintahan di wilayah ini diemban sepenuhnya oleh pejabat pemerintahan yang berkebangsaan Belanda (Sumber Arsip, 1973:263). *Kategori kedua* adalah wilayah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Pelaksanaan pemerintahan dipinjamkan kepada penguasa lokal yang menyelenggarakan pemerintahan atas nama pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu disebut “kerajaan pinjaman” (*leen vorstendom*). Dalam hal ini penguasa lokal tetap melaksanakan pemerintahan secara tradisional. Sesungguhnya kerajaan pinjaman adalah kerajaan-kerajaan yang setelah Perang Makassar masih dikategorikan sebagai “kerajaan sekutu” (*bondgenootschappelijke landen*), tetapi dalam proses perkembangannya melakukan perlawanan sehingga diduduki dan dikuasai. Namun karena kekurangan tenaga sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap diemban kepada pemerintah lokal. Kerajaan-kerajaan yang tergolong kategori ini antara lain Kerajaan Wajo, Tallo, Parepare, Tanete, dan Bone. *Kategori ketiga* adalah kerajaan-kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*).
 7. Kerajaan-kerajaan yang tetap berstatus sebagai kerajaan sekutu hingga awal abad ke-20, antara lain Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Konfederasi Ajatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappeng, dan Alitta) Konfederasi Massenrempulu (Maluwa, Alla, Batulappa, Buntubatu, Enrekang, Kassa, dan Maiwa), Konfederasi Mandar (Balanipa, Sendana, Majene, Pamboang, Tappalang, dan Mamuju), Buton, dan kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam wilayah kekuasaan langsung atau kerajaan pinjaman.

8. Makassar dinyatakan sebagai pelabuhan bebas mulai 1 Januari 1847 dan berubah menjadi pelabuhan wajib pajak mulai pada 1 Agustus 1906. Patut dikemukakan bahwa ketika pemerintah Hindia Belanda ingin membatalkan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1872. Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan itu pasti merugikan kedudukan ekonomi pemerintah karena pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu dipandang memainkan peranan penting dalam dunia perdagangan maritim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga asing, khususnya Singapura, Penang, dan bandar-bandar di Semenanjung Melayu. Peran penting mereka itu berkaitan dengan penguasaan perdagangan produksi laut yang sangat dibutuhkan oleh pedagang Eropa untuk menjalin perdagangan mereka dengan Cina, penghasil produksi teh yang sangat laris di Eropa (Poelinggomang, 2002:90).
9. Sebab-sebab lain tertundanya pelaksanaan kebijakan wajib pajak di Makassar; *Pertama*, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi, Gerrit W.W.C. Baron Koevell (1898-1903) pada 1900, bahwa penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia Belanda bagian timur. Kedua laporan ini menyebabkan pemerintahan meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. *Kedua*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat memblokir pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah. *Ketiga*, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputera tidak dapat dipenuhi. *Keempat*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap. *Kelima*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah (Poelinggomang, 2002:90-91).
10. Kroesen menyarankan untuk melakukan tindakan militer, serupa dengan yang dilakukan di Aceh. Tindakan militer itu terutama terhadap Bone dan Luwu, karena kedua kerajaan ini memiliki pengaruh kuat di Sulawesi Selatan dan gigih menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak (Kroesen, 1906:11; Harvey, 1989:46).
11. Lebih lanjut menurut Van Heutsz bahwa tindakan militer yang pertama harus dilakukan terhadap Bone karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya” Gubernur C.A. Kroesen pun setuju tindakan militer yang pertama dilakukan terhadap Bone. Karena selain kerajaan paling kuat dan berbahaya, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Bone sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman, namun menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai pelabuhan BajoE dan Pallime (Harvey, 1989:48).
12. Para penguasa lokal misalnya dituntut untuk menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Belanda, menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan impor, serta mengakui hak pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu
13. Rumusan *korte verklaring* tersebut, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik berdasarkan Pidato Tahta (*Troom Rede*) Ratu Belanda pada 1901. Hal inilah yang menjadi landasan Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan diplomatis untuk membenarkan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan (Poelinggomang, 2002:92; Harvey, 1989:46).
14. I Kasong Karaeng Allu adalah putra Tomailalang Towa Kerajaan Gowa dan sepupu satu kali dengan Raja Gowa I Makkulau Karaeng Lembangparang. Ia mengawini putri Arung Jampue (La Pamasangi), salah seorang anggota dewan hadat Sawitto yang sangat berpengaruh (Anonim, 1910:77)
15. Daeng Magontang adalah bangsawan asal Sawitto yang menjadi pimpinan perompak dan sering ke daerah Toraja melakukan penangkapan orang untuk dijual sebagai budak. Ia menempatkan basis perompakan dan perdagangan budak di pelabuhan Jampue dan Minanga Karaeng (Anonim, 1910:78).

16. Pada pertempuran itu, pasukan *passiuno* berjumlah sekitar 250 orang dan memiliki senjata api sekitar 20 pucuk serta dilengkapi dengan peralatan perang lainnya, yaitu berupa tombak, pedang, keris dan lain-lain serta mendapat dukungan dari laskar Suppa, Alitta, dan Jampue, sehingga pertempuran sengit antara kedua belah. Pasukan *passiuno* La Sinrang, yang mengandalkan keberanian dan semangat yang pantang menyerah dapat mengimbangi pasukan Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan modern (Ibrahim,1996:53; Arfah,1998:103).
17. Permaisuri Raja Gowa Sultan Husain yang bernama We Tenri Paddanreng Arung Alitta, adalah sepupu La Tamma Addatuang Sawitto. Dengan demikian, maka La Sinrang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan raja Gowa, yaitu sebagai kemenakan dari Permaisuri raja Gowa (Kadir,1984:53; Amir, 2007:157).
18. Berdasarkan akte perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Addatuang Sidenreng, bahwa Parepare menjadi daerah pinjaman Addatuang Sidenreng La Wawo tertanggal 7 Agustus 1824, kemudian kepada Addatuang Sidenreng La Pangoriseng tertanggal 23 September 1854, dan terakhir kepada Addatuang Sidenreng Sumange Rukka tertanggal 28 Oktober 1886 (Sumber Arsip, 1887:790-799).
19. Dalam pemulihan kembali kedudukan kejaraan-kerajaan di Ajatappareng menjadi swapraja, Kerajaan Alitta tidak dipulihkan kembali, tetapi justru dibentuk dua swapraja baru, yaitu Swapraja Mallusetasi dan Soppeng Riaja (Anonim,1910:79; Pemda, 1991:181-199).